



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

KPKNL BATAM

2025

PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam merupakan sebuah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan anggaran yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan (DJKN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Batam juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sesuai dengan visi dan misi DJKN di tahun 2025. Salah satu hal terpenting dari penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.



Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Batam tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024¹ yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Tahun 2025 merupakan salah satu tahun yang cukup menantang dalam pencapaian target kinerja KPKNL Batam, dimana terdapat beberapa terobosan dan agenda besar dalam pelaksanaan tugas tersebut. Namun demikian, secara akumulasi KPKNL Batam dapat mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,07 yang lebih tinggi dibandingkan capaian beberapa tahun terakhir. Capaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian kinerja pada *stakeholder perspective* sebesar 111,55 (bobot 30%), *customer perspective* sebesar 114,49 (bobot 20%), *internal process perspective* sebesar 115,38 (bobot 25%), dan *learning and growth perspective* sebesar 119,46 (bobot 25%).

Di sisi lain, peningkatan capaian kinerja tersebut juga diimbangi dengan capaian indeks Survei Kepuasan Layanan Pengguna (SKPL) yang mencapai 97,88 dari target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 77. Hal tersebut menunjukkan konsistensi KPKNL Batam dalam memberikan

¹ Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 masih dalam proses penetapan.

layanan terbaik bagi para pengguna layanan (stakeholder) yang selama ini berkontribusi atas penerimaan negara di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Dengan hasil survei tersebut diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Batam dan DJKN serta menjadi standar peningkatan kinerja selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan bagi *stakeholder* dan merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat.

Batam, [@TanggalIND]

Kepala KPKNL Batam

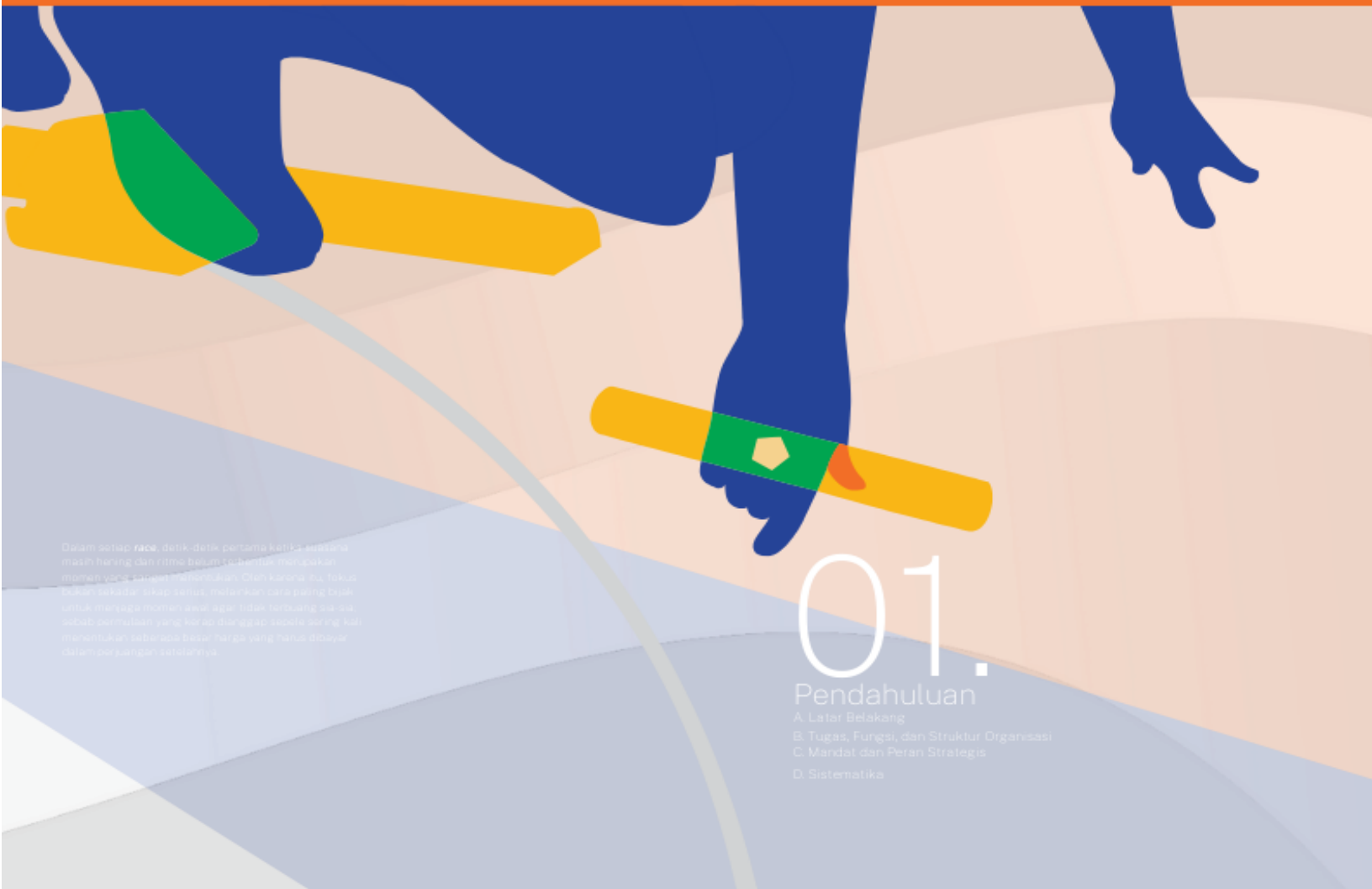


Ditandatangani secara elektronik

Kesatria Purba

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	6
Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
Rencana Strategis.....	9
Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
Capaian Kinerja Organisasi.....	17
Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV PENUTUP	56



Dalam setiap **race**, detik-detik pertama ketika keadaan masih tenang dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus badan adalah sikap selalu, melakukan cara paling bijak untuk mengatasi momen awal agar tidak terbuang sia-sia sebagai permulaan yang berujung dengan siapa yang lebih menemukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjalanan selanjutnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan layanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai satuan kerja pemerintah, KPKNL Batam dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun salah satu asas *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban KPKNL Batam atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Batam merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Batam memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Batam meliputi Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas 7 (tujuh) kota/kabupaten sebagai berikut: Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kepulauan Anambas.

KPKNL Batam dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit eselon IV dan 3 Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi;
5. Seksi Kepatuhan Internal; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.

BAGAN ORGANISASI KPKNL BATAM

Struktur Organisasi KPKNL Batam dapat dilihat sebagai berikut:





Foto: Pejabat Struktural di KPKNL Batam 2025

Dalam menjalankan tugasnya di tahun 2025, KPKNL Batam didukung oleh 31 pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
SMA	-	-	-	-
Diploma I	2	-	-	2
Diploma III	4	3	-	7
Sarjana	1	15	-	16
Pasca Sarjana	-	3	3	6
Doktor	-	0	0	0
Jumlah	6	23	2	31

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2025 KPKNL Batam memiliki pegawai dengan komposisi yang terdiri atas 6 (enam) pegawai lulusan pascasarjana, 16 (enam belas) pegawai lulusan sarjana, dan 9 (sembilan) pegawai lulusan diploma.

Tabel 1.2.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
Laki-laki	3	17	4	24
Perempuan	3	4	-	7
Jumlah	6	23	2	31

Tabel 1.2 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin per golongan pada KPKNL Batam tahun 2025. Terlihat bahwa komposisi pegawai KPKNL Batam didominasi oleh pegawai laki-laki, dimana sebanyak 24 orang adalah pegawai laki-laki, dan sebanyak 7 orang adalah pegawai perempuan.

Tabel 1.3.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Kelompok Umur	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
18-30 Tahun	4	4	-	8
31-40 Tahun	-	10	-	10
41-50 Tahun	-	2	7	9
>50 Tahun	-	2	2	4
Jumlah	4	18	9	31

Terlihat dalam Tabel 1.3 bahwa komposisi pegawai menurut kelompok umur di KPKNL Batam didominasi oleh pegawai yang masih muda yaitu untuk kategori umur 18 – 40 tahun sebanyak 18 orang. Selanjutnya, dalam Tabel 1.4 ditunjukkan sebaran pejabat fungsional pada KPKNL Batam. Terdapat sejumlah 12 orang memiliki keahlian sebagai Juru Sita, Pejabat Lelang, Penilai dan Pemeriksa.

Tabel 1.4.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

No.	Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita (Non Jabatan Fungsional)	1
2	Pelelang	5
3	Penilai	4
4	Pranata Keuangan APBN	2

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Batam memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut.

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administrator* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (pengelola aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. KPKNL sebagai aktor penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
5. KPKNL Batam memberikan kontribusi berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPKNL Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan;**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Batam, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPKNL Batam.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja;**

Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Batam, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja;**

Mengungkapkan pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Batam, evaluasi dan analisis kinerja, dan realisasi anggaran.

4. **Bab IV Penutup.**

Bab ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Kecapatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tingkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur tertentu. Pada tahun 2025 ini, KPKNL Batam merujuk pada rencana strategis DJKN Tahun 2020-2024² dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka KPKNL Batam mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2020-2024. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL Batam berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Visi KPKNL Batam sesuai Visi DJKN yaitu: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Dari visi yang ditetapkan dan pelayanan yang diberikan, maka arah organisasi dan pedoman pelaksanaan tugas KPKNL Batam adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan *Vendu Reglement, Ordonantie* 1908:198 tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblad*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029 masih dalam proses penetapan.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Batam sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Batam memiliki misi sebagaimana tertuang dalam misi DJKN, yang terdiri dari:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan seluruh visi dan misi di atas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Batam sebagaimana tujuan DJKN untuk periode 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif.
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.
4. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Batam telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra DJKN tahun 2020-2024, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;

- b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Batam. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Batam yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Melaksanakan sosialisasi regulasi dan tata kelola serta pembinaan kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Batam, yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan sinkronisasi tata kelola di tataran teknis, termasuk instansi pemerintah terkait;
 - c. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan BMN, sebagai bahan untuk menyusun LKPP;
 - d. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
 - e. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif;
 - f. Meningkatkan koordinasi dan mendorong percepatan sertifikasi BMN.

2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN adalah:
 - a. Penyusunan *database* BMN dengan memanfaatkan prasarana yang telah disiapkan;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Batam; dan
 - c. *Capacity building* SDM.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan pembiayaan dari aset *recovery* yang optimal antara lain:
 - a. Penyelesaian Piutang Negara yang mempunyai nilai *outstanding* besar atau *high profile*;
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan Piutang Negara;
 - c. Penyelesaian aset properti yang belum dilengkapi dengan dokumen peralihan;
 - d. Verifikasi fisik aset properti dan pengurusan kelengkapan dokumen dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan unit internal maupun ekstermal KPKNL Batam untuk melakukan efisiensi dan percepatan permohonan penilaian;
 - b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait dengan peningkatan standardisasi pelayanan penilaian kepada instansi vertikal;
 - c. Penjaminan kualitas dan pengembangan profesional berkelanjutan Penilai Pemerintah;
 - d. Pengembangan Riset Data dan Informasi Penilaian.
5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang Negara adalah.
 - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN di atas Rp 1 miliar dengan fokus pada penyerahan dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI;
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan;
 - c. Meningkatkan koordinasi kepada para pemangku kepentingan terkait untuk pelaksanaan tahapan pengurusan piutang negara.

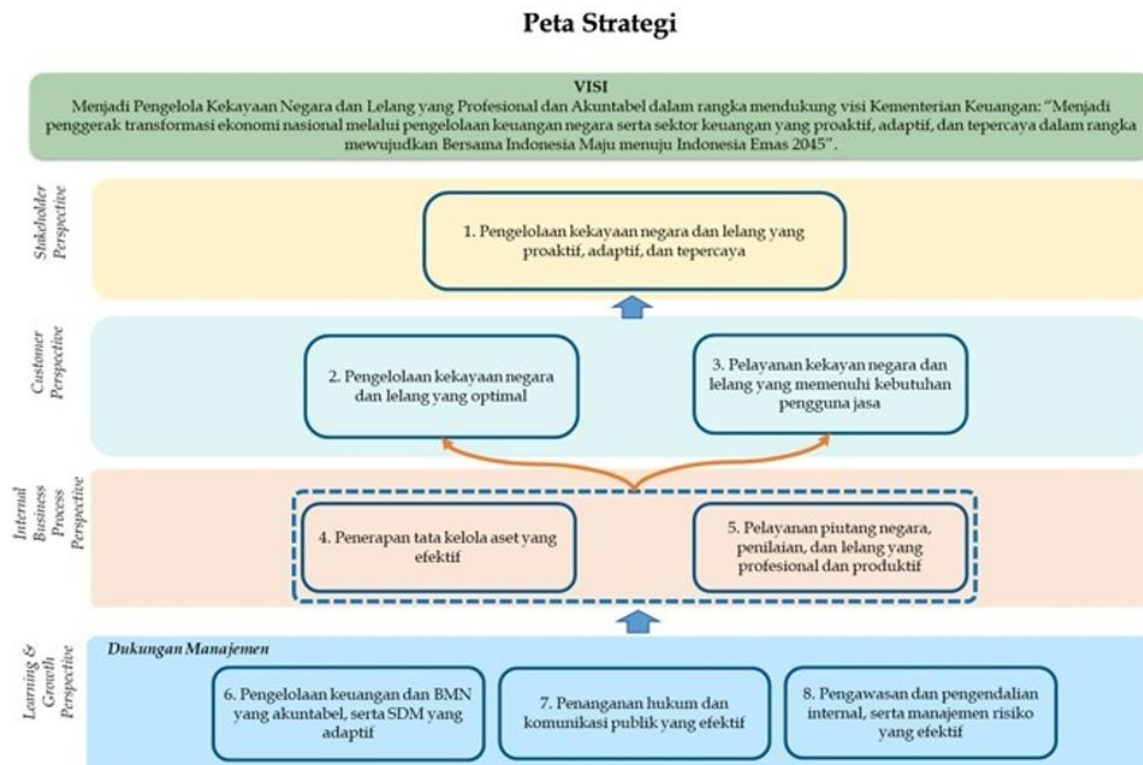
6. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain.
 - a. Melaksanakan program modernisasi lelang melalui *e-auction* sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - b. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang; dan
 - c. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
7. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai;
 - c. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif;
 - d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai *core business*;
 - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko;
 - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal; dan
 - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Gambar 2.1

PETA STRATEGI KEMENKEU THREE TAHUN 2025



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Batam harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Batam. Sasaran Strategis KPKNL Batam Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2025 yang terlihat pada Gambar 2.1. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2025 memuat 10 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang Sasaran Strategis dan IKU tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.2
SASARAN STRATEGIS DAN TARGET IKU KEMENKEU THREE TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp601,8 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,1 M)
		2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp345,0 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80



Di hadapan stakeholder, tidak akan cukup hanya diumumkan bahwa misi atau visi organisasi sudah dilaksanakan atau dilaksanakan melalui tanggung jawab yang berwujud dan nyata dengan ke-tangan-ber-kurva. Ada momen yang sangat singkat ketika rencana, mimpi, dan harapan-cita dapat berwujud menjadi kenyataan yang berwujud nyata tanpa mengabaikan elemen yang tidak melampaui batasnya, serta tingkah laku yang harus berwujud dengan nyata, sudah menunjukkan lampainya yang baru pada nilai yang paling mendasar.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB III

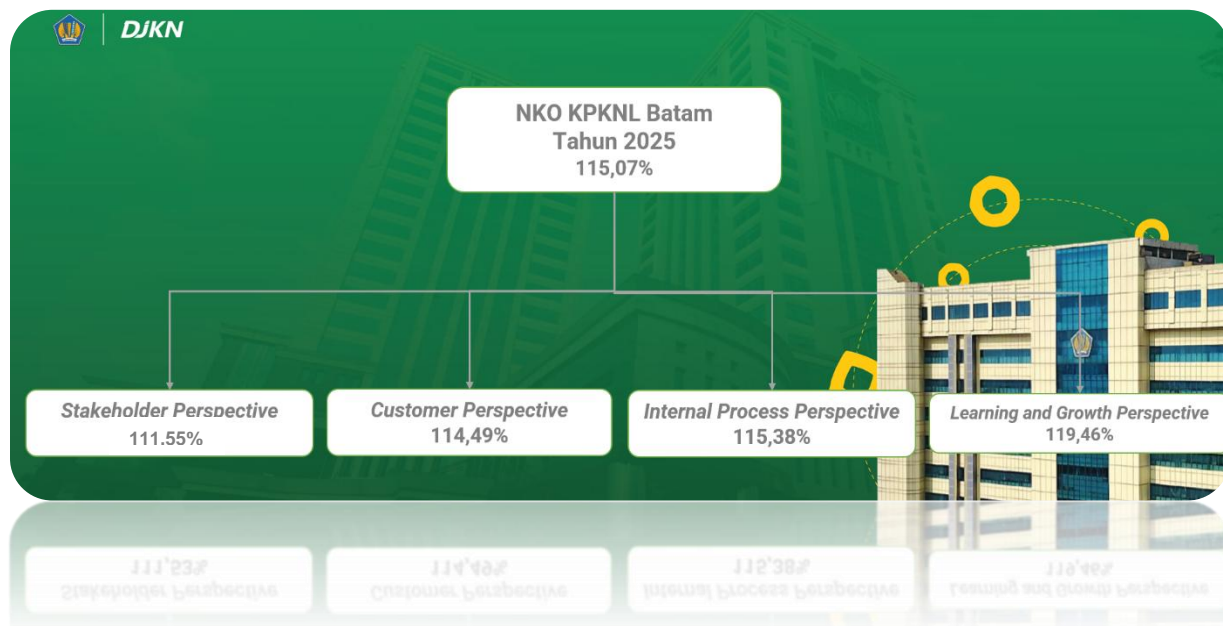
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Batam Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam adalah sebesar 115,07. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1.

CAPAIAN KINERJA MASING-MASING PERSPEKTIF



Dalam kinerja tahun 2025, KPKNL Batam berhasil mencatatkan capaian berstatus hijau atas keseluruhan IKU, yakni sejumlah 18 (delapan belas) IKU. Hal tersebut mengindikasikan bahwa KPKNL Batam telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Berikut rincian capaian kinerja atas 18 IKU KPKNL Batam Tahun 2025.

Tabel 3.1.

SASARAN STRATEGIS, TARGET, REALISASI, CAPAIAN KEMENKEU TRHEE KPKNL BATAM TAHUN 2025

Kode SS /IKU	Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target Y	Target (Desember)	Realisasi (Desember)	Target s.d (Desember)	Realisasi s.d (Desember)	Capaian (Desember)	Capaian s.d (Desember)
Stakeholder Perspektif (30%)							111.55	111.55
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya						111.55	111.55
1a-CP	Indeks integritas	100	100	105.29	100	105.32	105.32	105.32
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	128.21	100	128.21	120	120
Customer Perspektif (20%)							114.49	114.49
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						108.98	108.98
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	100	103.84	100	103.84	103.84	103.84
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	100	136.36	100	136.36	120	120
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	105.99	100	105.99	105.99	105.99

3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						120	120
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	134.62	74	128.18666666666667	120	120
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	97.88	77	97.58666666666666	120	120
Internal Process Perspektif (25%)							115.38	115.38
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif						110.76	110.76
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	100	101.52	100	101.52	101.52	101.52
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100	100	120	100	120	120	120
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						120	120
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	149.47	100	149.47	120	120
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	94.79	70	95.63666666666667	120	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80	80	115	80	115	120	120
Learning and Growth Perspektif (25%)							119.46	119.46
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						120	120

6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	80	97.31	80	97.31	120	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	120	100	120	120	120
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	120	100	120	120	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						118.38	118.38
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	116.76	100	116.76	116.76	116.76
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	116	80	116	120	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						120	120
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	98.5	80	98.5	120	120
NILAI KINERJA ORGANISASI							115.07	115.07

Dari capaian kinerja terhadap 18 IKU Kemenkeu Three tahun 2025 tersebut, KPKNL Batam melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 (Tabel 3.2 akan diuraikan tiap bagian Perbandingan dan Analisis Kinerja), membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024, dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah.

Sasaran Strategis 1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya
----------------------------	---

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Integritas

a. Deskripsi Kinerja

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.2A dan Tabel 3.2B menunjukkan bahwa IKU Indeks integritas tercapai dengan angka capaian sebesar 105,29%. Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2024, sehingga perbandingan capaian hanya dapat dilakukan dengan capaian pada tahun sebelumnya

Tabel 3.2A

Realisasi Indeks Integritas KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya						
	1a-CP	Indeks Integritas.					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	MAX
REALISASI	100	100	100	105,29	105,32	105,32	TLK
CAPAIAN	100	100	100	105,29	105,32	105,32	

TABEL 3.2B

Tabel Perbandingan Realisasi Indeks Integritas KPKNL Batam

	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas 2024	89,17	92,44	103,67
Indeks Integritas 2025	100	105,32	105,32

Dalam rangka merealisasikan capaian tersebut, terdapat langkah-langkah yang dioptimalkan oleh KPKNL Batam pada Tahun 2025, antara lain:

- a) Memaksimalkan pemasangan media peraga di lingkungan KPKNL Batam untuk mengkampanyekan gerakan anti KKN;
- b) melakukan sosialisasi rutin baik dalam forum seremonial maupun melalui media sosial kepada seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Batam mengenai gerakan anti KKN;
- c) memaksimalkan fungsi kanal-kanal pengaduan resmi, baik yang disediakan secara mandiri oleh KPKNL Batam maupun yang sistem terintegrasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- d) melakukan pengawasan terstruktur pada area-area rawan yang berpotensi menjadi celah penyimpangan.

2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

a. Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap. Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.3A dan Tabel 3.3B menunjukkan bahwa target persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sudah tercapai pada tahun 2025 sebesar 128,21%. Komposisi realisasi dan capaian IKU ini berdasarkan komponen adalah sebagai berikut.

TABEL 3.3A

Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya						Pol/KP
	1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	
TARGET	60.145.986.256,50	180.541.458.769,50	180.541.458.769,50	360.030.917.539,00	658.444.300.000,00	658.444.300.000,00	MAX
REALISASI	184.206.662.217,00	545.237.572.307,00	545.237.572.307,00	654.249.315.412,14	844.183.245.201,00	844.183.245.201,00	TLK
CAPAIAN	306,27%	302,00%	302,00%	181,72%	128,21%	128,21%	

TABEL 3.3B

Tabel Perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	95.035.026.503	153.303.500.000	267.361.000.000	281.600.000.000	658.444.300.000
Realisasi	262.778.650.765	311.806.897.022	317.234.917.300	537.595.034.153,42	844.183.245.201
Capaian	276,507%	203,39%	118,65%	190,91%	128,21%

Target realisasi PNB pada KPKNL Batam mengalami peningkatan gradual yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dimana target realisasi PNB Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp658.444.300.000,00 yang melonjak lebih dari 2 (dua) kali lipat lebih tinggi dari target tahun sebelumnya. Namun demikian, dalam 5 (lima) tahun terakhir KPKNL Batam tetap dapat memenuhi target realisasi PNB dengan capaian di atas 100% (seratus per seratus).

Realisasi PNBPN tersebut terdiri atas PNBPN BMN, PNBPN PN, dan PNBPN Lelang, dimana PNBPN BMN memberikan kontribusi capaian yang cukup signifikan.

Terdapat tantangan besar dalam pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Batam, antara lain:

- a) Wilayah kerja KPKNL Batam yang meliputi seluruh Provinsi Kepulauan Riau dengan kondisi geografis berupa kepulauan yang dapat mengakibatkan keterbatasan mobilitas dalam pemberian layanan; dan
- b) Adanya kekhususan pengelolaan di Kota Batam dimana Badan Pengusahaan Batam memiliki kewenangan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pengelolaan BMN di lingkungan satuan kerja di Kota Batam.

Adapun untuk mencapai realisasi PNBPN yang optimal, pada tahun 2025 KPKNL Batam menekankan beberapa strategi, antara lain:

- 1) penguatan sinkronisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal KPKNL Batam, sehingga proses yang berkesinambungan seperti penetapan status penggunaan, penilaian, pemindahtanganan BMN sampai dengan realisasi pelaksanaan lelang dapat terus berjalan;
- 2) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN untuk mengurangi adanya kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang seharusnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara;
- 3) penggalan potensi kepada para pemangku kepentingan, baik dari aspek pengelolaan BMN, pelaksanaan lelang, sampai dengan penyerahan dan penyelesaian piutang negara, termasuk penyerahan dari BPJS, dengan mempertimbangkan daya ungkit untuk memaksimalkan dampak yang diperoleh.

Sasaran Strategis 2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
----------------------------	--

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan Negara. Sasaran strategis berikutnya adalah pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal, dimana terdapat 3 IKU dengan capaian sebagai berikut:

1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

a. Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU terkait dengan Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara ini merupakan penyempurnaan dari IKU terkait dengan evaluasi kesesuaian pengelolaan BMN berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK). Capaian IKU ini terlihat dari Tabel 3.4. sebagai berikut:

TABEL 3.4.

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	50%	60%	60%	80%	100%	100%	MAX
REALISASI	158,33%	102,85%	102,85%	107,53%	103,84%	103,84%	TLK
CAPAIAN	158,33%	102,85%	102,85%	107,53%	103,84%	103,84%	

2. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

a. Deskripsi Kinerja

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Macet menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang macet yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang macet yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- b. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- c. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- d. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- e. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

- a. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- b. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
- c. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2025 pada KPKNL Batam dengan formulasi yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Tabel 3.5 tersaji data capaian KPKNL Batam Tahun 2025.

TABEL 3.5

Tabel Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	50.000.000	200.000.000	200.000.000	450.000.000	15.908.472.329	100%	MIN
REALISASI	419.079.347	583.213.934	583.213.934	11.666.902.499	11.666.903.000	136,36%	TLK
CAPAIAN	838,16%	291,61%	291,61%	259,64%	136,36%	136,36%	

3. Persentase Realisasi Pokok Lelang

a. Deskripsi Kinerja

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu:

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksanaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNPB Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang

diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pada Tabel 3.6A dan Tabel 3.6B menunjukkan target realisasi lelang pada tahun 2025 sudah tercapai sebesar 105,99%. Perbandingan realisasi capaian hasil bersih lelang beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6A

Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal						
	2c-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	32.915.000.000	103.500.000.000	103.500.000.000	172.500.000.000	345.000.000.000	345.000.000.000	MAX
REALISASI	48.333.170.331	131.816.238.736	131.816.238.736	229.959.131.627	365.663.086.783	365.663.086.783	TLK
CAPAIAN	146,84%	127,36%	127,36%	133,31%	105,99%	105,99%	

TABEL 3.6B

Tabel Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	330.000.000.000	269.000.000.000	463.360.000.000	480.314.000.000	345.000.000.000
Realisasi	360.834.693.092	399.382.473.176	497.506.936.756	397.161.353.104	365.663.086.783
Capaian	109,34%	148,19%	107,37%	82,69%	105,99%

IKU terkait dengan realisasi pokok lelang merupakan salah satu IKU yang sangat menantang, dikarenakan sifat pelayanan lelang yang dilakukan berdasarkan permohonan dan tingginya faktor eksternalitas dalam pelaksanaan lelang. Target realisasi pokok lelang di KPKNL Batam pada tahun 2025 mengalami penyesuaian seiring dengan berakhirnya masa *recovery* pasca Pandemi Covid-19 seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat. Namun demikian, realisasi persentase capaian pada tahun 2025 capaian realisasi pokok lelang KPKNL Batam menunjukkan kenaikan.

Salah satu faktor pendorong capaian tersebut adalah meningkatnya realisasi pokok lelang pegadaian yang pada tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam pencapaian target realisasi pokok lelang pada KPKNL Batam tahun 2025, antara lain:

- a) penggalian potensi lelang kepada pemangku kepentingan di internal maupun eksternal KPKNL Batam, sehingga dapat dilaksanakan lelang;
- b) sosialisasi terkait dengan ketentuan terbaru pemasangan foto/ilustrasi objek pada aplikasi lelang.go.id untuk menarik minat para peserta lelang dan memberikan kejelasan dan kepastian bagi pembeli;
- c) koordinasi kepada para pemangku kepentingan untuk mempermudah pengurusan perizinan pasca lelang, seperti BPHTB pada Bapenda Kota Batam, IPH/UWTO pada BP Batam sehingga mengangkat citra lelang sebagai transaksi yang aman dan mudah.

Pada tahun 2025, KPKNL Batam telah menyelenggarakan beberapa jenis lelang yang baru pertama kali dilakukan, seperti lelang barang temuan kejaksaan berupa bijih bauksit, lelang barang sitaan karantina berupa beras. Selain itu, KPKNL Batam juga telah mengupayakan penyelenggaraan beberapa lelang dengan nilai yang signifikan seperti barang rampasan negara berupa kapal tanker, lelang harta pailit berupa hotel.

Sasaran Strategis 3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa
----------------------------	---

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 2 IKU KPKNL dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

a. Deskripsi Kinerja

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini di KPKNL terdiri dari 2 komponen antara lain:

- 1) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang.
- 2) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara

Ketentuan cascading IKU di KPKNL

- 1) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang.
- 2) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU ini menjadi IKU mandatory pada KPKNL Batam sejak tahun 2025. Adapun capaian atas realisasi pelaksanaan IKU sebagaimana Tabel 3.7.

TABEL 3.7

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna						
	3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	PoL/KP
TARGET	74	74	74	74	74	74	MAX
REALISASI	141,89	135,55	135,55	140,29	128,18	128,18	TLK
CAPAIAN	191,75	181,82	181,82	189,58	120	120	

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

a. Deskripsi Kinerja

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur;
- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Biaya/Tarif;
- 5) Produk Layanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana;
- 7) Perilaku Pelaksana;
- 8) Sarana Prasarana;
- 9) Sarana Pengaduan.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Adapun capaian atas realisasi pelaksanaan IKU sebagaimana Tabel 3.8.

TABEL 3.8

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNI Batam Tahun 2025

DJKN	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna						
	3b-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	77	77	77	77	77	77	MAX
REALISASI	96,33	97,87	97,87	97,44	97,88	97,88	TLK
CAPAIAN	125,10	127,10	127,10	126,55	120	120	

Sasaran Strategis 4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif
----------------------------	--

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 2 IKU KPKNL dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

a. Deskripsi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4).

IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pada Tabel 3.9A dan Tabel 3.9B terlihat bahwa target Persentase penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah sudah tercapai sebesar 112,75%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut:

TABEL 3.9A

Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif						
	4a-CP	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	K1-K4	K1-K4	K1-K4	K1-K4	K1-K4	790 Bidang	MAX
REALISASI	K1-K4	K1-K4	K1-K4	K1-K4	K1-K4	802 Bidang	TLK
CAPAIAN	32,41%	54,68%	54,68%	73,92%	101,52%	101,52%	

*) Target dan realiasi dikategorikan menjadi 4 Kelompok.

TABEL 3.9B

Tabel Perbandingan Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	236 Bidang	92 Bidang	289 Bidang	296 Bidang	790 Bidang
Realisasi	236 Bidang	107 Bidang	326 Bidang	336 Bidang	802 Bidang
Capaian	100%	116,30%	107,16%	112,75%	101,52%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa dalam 5 (lima) tahun berturut-turut KPKNI Batam dapat memenuhi target pensertipikatan bidang tanah BMN, khususnya di tahun 2025 dengan besaran target yang melebihi 2 (dua) kali lipat dari periode sebelumnya. Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.



Foto: Kegiatan Koordinasi Pensertipikatan di Kepulauan Riau.

2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

a. Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan pengelola barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dengan melihat Tabel 3.10A dan Tabel 3.10B dapat diketahui bahwa target Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) sudah tercapai sebesar 120% dari target sebesar 455 Aset dan 23 rekomendasi.

TABEL 3.11A

Persentase Evaluasi Kinerja BMN KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif						
	4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	56 aset + 3 rek.	187 aset + 9 rek.	187 aset + 9 rek.	280 aset + 14 rek.	373 aset + 19 rek.	373 aset + 19 rek.	MAX
REALISASI	74 aset + 3 rek.	162 aset + 9 rek.	162 aset + 9 rek.	280 aset + 23 rek.	455 aset + 23 rek.	455 aset + 23 rek.	TLK
CAPAIAN	120%	103,43%	103,43%	108,08%	120%	120%	

TABEL 3.11B

Tabel Perbandingan Persentase Evaluasi Kinerja BMN Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	121 Unit	370 Unit	56 Unit	117 Unit	373 aset + 19 rekoemndasi
Realisasi	123 Unit	382 Unit	65 Unitt	139 Unit	455 aset + 23 rekomendasi
Capaian	101,65%	115,69%	116,55%	134,14%	120%

Penyesuaian formula IKU persentase evaluasi kinerja BMN pada tahun 2025 dengan memperhitungkan jumlah aset yang dievaluasi dan jumlah rekomendasi tidak mengakibatkan penurunan pencapaian oleh KPKNL Batam.

Sasaran Strategis 5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif
----------------------------	---

Sasaran strategis ini memuat 3 IKU KPKNL dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

a. Deskripsi Kinerja

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa:

- 1) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a) Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b) Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

- 2) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a) Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b) Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c) Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

- 3) Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a) Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b) Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focusPN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara merupakan IKU yang baru ditetapkan mulai tahun 2025 pada KPKNL Batam. Dalam Tabel 3.12 tersaji data capaian KPKNL Batam Tahun 2025.

TABEL 3.12

Tabel Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif						
	5a-CP	Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Po/KP
TARGET	4	9	9	14	19	19	MIN
REALISASI	7	11	11	17	25	25	TLK
CAPAIAN	195%	136,67%	136,67%	135,71%	148,69%	148,69%	

2. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

a. Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah: Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

- a. Terdapat kekurangan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon;
- b. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan;
- c. Dalam hal ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD);
- d. Dalam hal Penilai Pemerintah Perorangan/ Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - 1) Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - 2) Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - 3) Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - 4) Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau

5) objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.

Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).

e. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian.

Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian. Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis;
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.

*terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN;
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN;
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN;

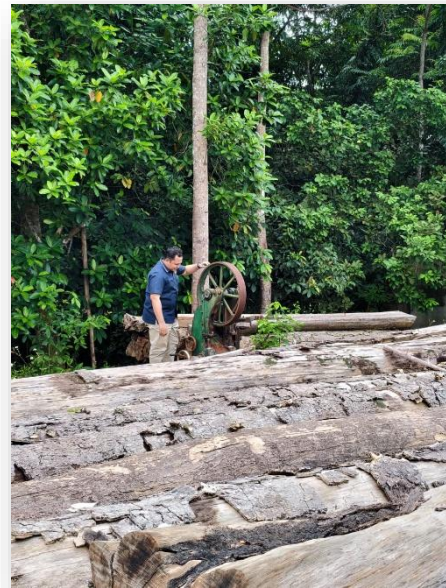
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 38 hari kerja untuk penilaian bisnis;
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 40 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam.

(jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya.

*jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja.



(Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 ($17 + 2 \times 3$) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. *Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku. Jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada kepdirljen nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023, 59/KN/2023, 69/KN/2023.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dari Tabel 3.13 terlihat bahwa target rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien sudah tercapai sebesar 9479 dengan capaian IKU 135,42%.

TABEL 3.13

Tabel Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian Tahun 2025

	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata Indeks	70%	94,79%	135,42%

Pemberian layanan penilaian yang tepat waktu tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh para Penilai di lingkungan KPKNL Batam. Salah satu kondisi tantangan terbesar adalah kondisi geografis wilayah kerja KPKNL Batam yang berupa kepulauan, sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan penilaian.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Penilai di lingkungan KPKNL Batam selalu meningkatkan koordinasi dengan unit internal KPKNL Batam dan para pemohon, sehingga pelaksanaan penilaian pada lokasi aset dalam suatu kawasan dapat dilaksanakan secara bersamaan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas.

3. Persentase Produktivitas Lelang

a. Deskripsi Kinerja

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Perhitungan IKU produktivitas lelang pada tahun 2025 meliputi 2 (dua) komponen utama, yakni: rata-rata capaian lot lelang laku dengan bobot 60% dan persentase frekuensi lelang dengan bobot 40%.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.14A dan Tabel 3.14B menunjukkan bahwa bahwa IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2025 sudah tercapai 144,83%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut:

TABEL 3.14A

Tabel Persentase Produktivitas Lelang KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif						
	5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	450	450	450	450	450	80%	MAX
REALISASI	109	187	187	326	509	115,87%	TLK
CAPAIAN	62,53%	72,93%	72,93%	91,32%	115,87%	144,83%	

TABEL 3.14B

Tabel Persentase Produktivitas Lelang Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	35%	36,00%	80%	89%	80%
<u>Realisasi</u>	36,33%	37,65%	100,57%	121,11%	115,87%
<u>Capaian</u>	103,81%	104,59%	125,71%	133,18%	144,83%

Tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Persentase pencapaian produktivitas lelang lebih mudah dicapai daripada IKU lelang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak semua risalah lelang yang diterbitkan merupakan risalah lelang laku. Namun IKU ini tetap sangat mencerminkan jumlah permohonan lelang yang diterima dan ditetapkan oleh KPKNL Batam.

Kedepannya, KPKNL Batam tetap akan terus melakukan penggalan potensi lelang ke berbagai instansi dalam upaya mengenalkan lelang sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Sasaran Strategis 6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif
----------------------------	--

Sasaran strategis ini memuat 3 IKU KPKNL dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

a. Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara Perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran diperhitungkan mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu. Pada Tabel 3.15A dan Tabel 3.15B terlihat bahwa capaian IKU ini tercapai 120%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

TABEL 3.15A

Tabel Indeks Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif						
	6a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	MAX
REALISASI	120	120	120	120	120	120	TLK
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	

TABEL 3.15B

Tabel Perbandingan Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	95,5	95,5	100	100	100
Realisasi	95,40	96,07	94,31	120	120
Capaian	99,90	100,60	94,31	120	120

IKU ini memiliki tujuan strategis yaitu Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a. Deskripsi Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Sebagai salah satu bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Target nasional untuk P3DN Kementerian Keuangan adalah 95%. Dalam mendukung pencapaian target nasional Kemenkeu diperlukan indikator untuk mengukur kinerja pencapaian P3DN.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Capaian atas pelaksanaan IKU ini sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.16.

TABEL 3.16

Tabel Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNI Batam Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif						
	6b-N	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksaaan Anggaran					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	80	80	80	80	100	100	MAX
REALISASI	59,80	70	70	120	120	120	TLK
CAPAIAN	74,75	87,50	87,50	150	120	120	

3. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

a. Deskripsi Kinerja

IKU ini mengukur persentase pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jmlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jmlat adalah 45 menit. Standar jmlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jmlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Perbandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.17A dan Tabel 3.17B menunjukkan bahwa IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai untuk tahun 2024 tercapai dengan angka capaian sebesar 130%. Berikut perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir.

TABEL 3.17A

Tabel Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif						
	6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	80%	80%	80%	80%	80%	80%	MAX
REALISASI	25,87%	59%	59%	83,50%	97,31%	97,31%	TLK
CAPAIAN	32,34%	59%	73,75%	104,38%	121,64%	121,64%	

TABEL 3.17B

Tabel Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target	100%	75%	100%	90%	80%
Realisasi	120%	120%	120%	117%	97,31%
Capaian	120%	160%	120%	130%	121,64%

Dalam pencapaian IKU ini KPKNL Batam khususnya Subbagian Umum senantiasa memantau pegawai yang sudah atau belum melaksanakan diklat serta memantau progress dari diklat pegawai tersebut sudah terpenuhi atau belum. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis 7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif
----------------------------	--

Sasaran strategis ini memuat 2 IKU KPKNL dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

a. Deskripsi Kinerja

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum merupakan indeks yang menggambarkan capaian atas penanganan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi. Tujuan dari IKU ini adalah agar penanganan permasalahan hukum dapat optimal diselesaikan.

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum meliputi 2 komponen sebagai berikut:

- 1) Indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan (perkara aktif) dengan bobot 80%; dan
- 2) Indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap (perkara selesai) dengan bobot 20%.

Penetapan indeks ini sebagai IKU organisasi di KPKNL Batam baru mulai diterapkan pada tahun 2025.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Penetapan indeks ini sebagai IKU organisasi di KPKNL Batam baru mulai diterapkan pada tahun 2025. Berikut disajikan capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum KPKNL Batam pada Tahun 2025.

TABEL 3.18

Tabel Indeks Penanganan Permasalahan Hukum KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif						
	7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	100	100	100	100	100	100	MAX
REALISASI	118,8	118,91	118,91	118,48	116,76	116,76	TLK
CAPAIAN	118,82	118,91	118,91	118,48	116,76	116,76	

2. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

a. Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

Penghitungan capaian IKU ini meliputi 3 (tiga) komponen, sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian informasi public atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
- 2) Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi public;
- 3) Penyediaan dan pemutakhiran informasi public pada website.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Penetapan indeks ini sebagai IKU organisasi di KPKNL Batam baru mulai diterapkan pada tahun 2025. Berikut disajikan capaian IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum KPKNL Batam pada Tahun 2025.

TABEL 3.19

Tabel Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif						
	7b-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	80	80	80	80	80	80	MAX
REALISASI	115	85	85	94	94	94	TLK
CAPAIAN	143,75	106,25	106,25	117,50	117,50	117,50	

Pada tahun 2025 ini KPKNL Batam telah menerapkan standar layanan informasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan DJKN. Dalam tataran pelaksanaannya terdapat penyempurnaan layanan, antara lain:

- 1) Penerapan standar layanan, sarana prasarana, dan standar interaksi layanan informasi dalam 3 (tiga) kanal layanan, yakni area penerimaan tamu (APT), telepon, dan whatsapp;
- 2) Penggunaan aplikasi SLI'D yang terintegrasi dengan crm-deskpro pada Kantor Pusat DJKN;
- 3) Penerapan aplikasi permohonan informasi publik dan penyelenggaraan PPID.

Sasaran Strategis 8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif
----------------------------	--

Sasaran strategis ini memuat 1 IKU dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

a. Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

b. Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.20A dan Tabel 3.20B menunjukkan bahwa IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko tercapai dengan angka capaian sebesar 115,01%. Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2023.

TABEL 3.20A

Tabel Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko KPKNL Batam Tahun 2025

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif						
	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko					
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
TARGET	80	80	80	80	80	80	MAX
REALISASI	97,24	99,60	99,60	99,74	98,50	98,50	TLK
CAPAIAN	121,55	124,50	124,50	124,68	123,12	123,12	

TABEL 3.20B

Tabel Perbandingan Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2023-2025

	2023	2024	2025
Target	80	85	80
Realisasi	92,34	97,76	98,50
Capaian	115,46	115,01	123,12

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2025, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun Anggaran 2025 dan Tabel Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2022 s.d. 2025.

TABEL 3.21

Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun 2025

Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	3.416.103.000,00	3.071.484.000,00	2.954.004.419,00	96,18%
Belanja Modal	5.465.866.000,00	2.257.857.000,00	2.251.498.370,00	99,72%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Total	8.881.969.000,00	5.329.341.000,00	5.205.502.789,00	97,95%

TABEL 3.22

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Pendanaan KPKNL Batam Tahun 2025


Sumber	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Rupiah Murni	8.822.153.000,00	5.294.903.000,00	5.176.824.818,00	97,77%
PNBP	59.816.000,00	34.438.000,00	28.677.971,00	83,27%
Total	8.881.969.000,00	5.329.341.000,00	5.205.502.789,00	90,52%

Selanjutnya, pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2022 s.d. 2025 yang ditunjukkan dalam Tabel 3.23 dapat dilihat bahwa dari tahun 2023 ke 2025 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami kenaikan.

TABEL 3.23

Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun 2025

Kegiatan	2023			2024			2025		
	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	2.524.540.000	2.274.533.334	90,10%	3.138.814.000	2.931.405.784	93,39%	3.071.484.000	2.954.004.419	96,18%
Belanja Modal	1.802.763.000	1.733.047.880	96,13%	492.023.000	479.863.000	97,53%	2.257.857.000	2.251.498.370	99,72%
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4.327.303.000	4.007.581.214	92,61%	3.630.837.000	3.411.268.784	93,95%	5.329.341.000	5.205.502.789	97,95%



Demi bisa bukan sekadar bisa saja, melainkan ampuh makna yang menginspirasi juga. Sukses merupakan individu, ketepatan arah, kerja, dan kemampuan yang dapat di setiap masa. Sukses di mana berarti itu keberhasilan tidak saja dan satu jalan yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menanggapi, memantapkan pada, dan tetap berdiri pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPKNL Batam tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Batam dalam tahun anggaran 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Batam merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Batam mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Batam dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

The image features a central white rectangular area. This area is framed by a solid orange border at the top and bottom. On the left and right sides of the white area, there are large, curved, green shapes that resemble stylized leaves or petals. These green shapes overlap each other and the white background. The word "Lampiran" is written in a white, sans-serif font in the lower-left portion of the white area.

Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.03/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

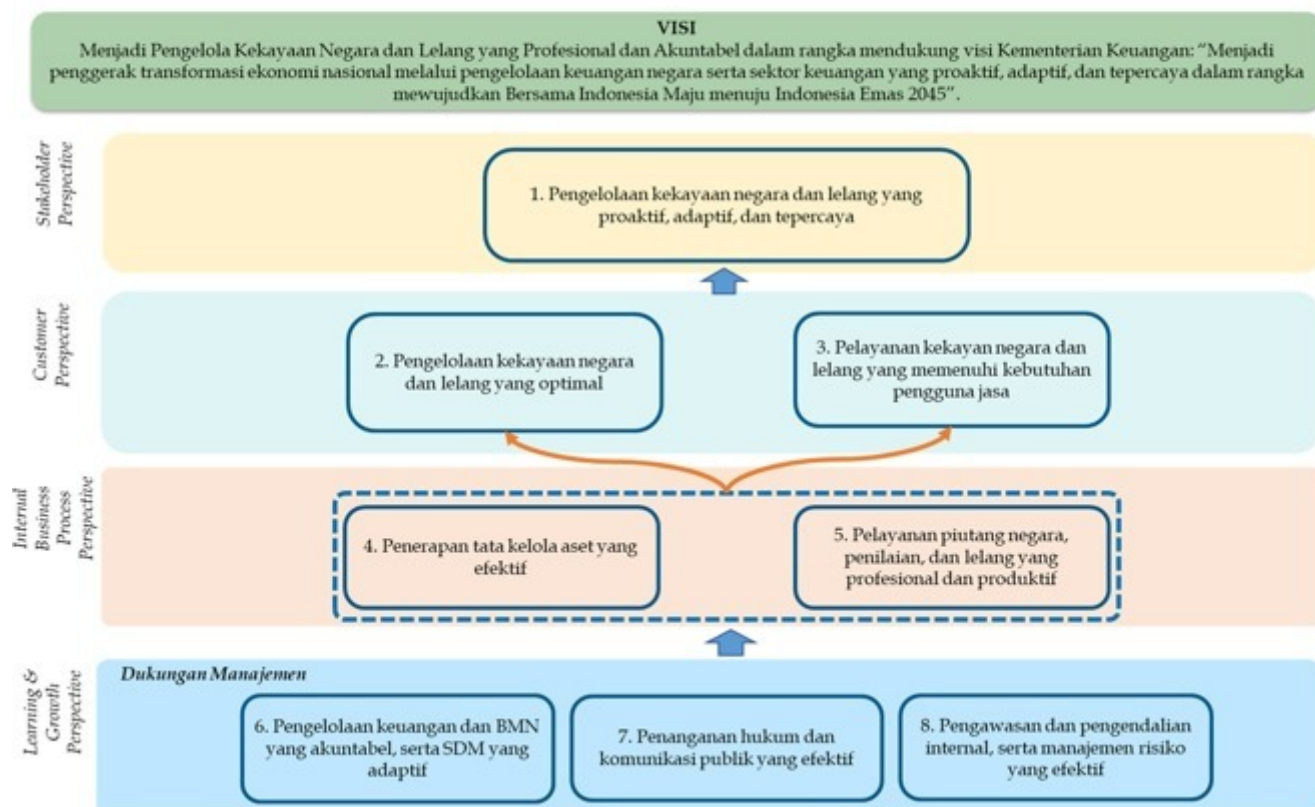


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp601,8 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,1 M)
		2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp345,0 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp915,034,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp96,264,000
2. Pengelolaan Aset	Rp818,770,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp7,673,351,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp42,000,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp7,523,917,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp86,115,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp21,319,000

BATAM KOTA, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat,
dan Kepulauan Riau



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Batam



Ditandatangani Secara Elektronik
Kesatria Purba



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp601,8 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp345,0 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5	40	40	60	60	100	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15	50	50	75	75	100	100
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	100	100	100	100	100
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30	40	40	70	70	80	80
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

BATAM KOTA, Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam



Ditandatangani Secara Elektronik
Kesatria Purba



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

BATAM KOTA, Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam



Ditandatangani Secara Elektronik
Kesatria Purba



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kesatria Purba		NAMA	Wahyu Prihantoro
NIP	19700725 199603 1 001		NIP	19720417 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp601,8 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,1 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp345,0 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



BATAM KOTA, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Kesatria Purba
19700725 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro
19720417 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp601,8 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp345,0 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5	40	40	60	60	100	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15	50	50	75	75	100	100
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	100	100	100	100	100
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30	40	40	70	70	80	80
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



BATAM KOTA, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Kesatria Purba

19700725 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wahyu Prihantoro

19720417 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04a/WKN.03/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

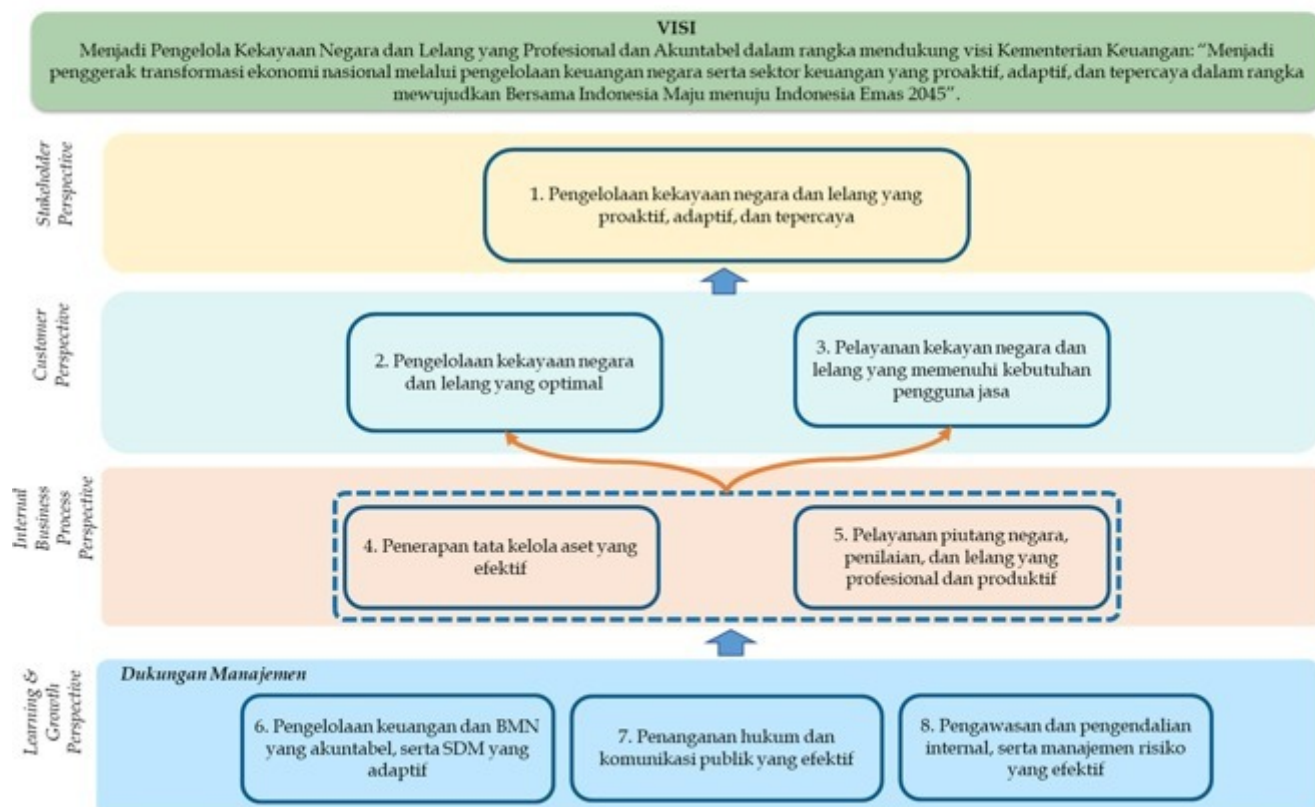


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp654,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp11,6 M)
		2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp345,0 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp915,034,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp96,264,000
2. Pengelolaan Aset	Rp818,770,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp7,673,351,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp42,000,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp7,523,917,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp86,115,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp21,319,000

BATAM KOTA, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat,
dan Kepulauan Riau



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Batam



Ditandatangani Secara Elektronik
Kesatria Purba



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp654,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp345,0 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5	40	40	60	60	100	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15	50	50	75	75	100	100
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	100	100	100	100	100
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30	40	40	70	70	80	80
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

BATAM KOTA, Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam



Ditandatangani Secara Elektronik
Kesatria Purba



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

BATAM KOTA, Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam



Ditandatangani Secara Elektronik
Kesatria Purba



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kesatria Purba		NAMA	Wahyu Prihantoro
NIP	19700725 199603 1 001		NIP	19720417 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp654,2 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp11,6 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp345,0 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



BATAM KOTA, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Kesatria Purba
19700725 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro
19720417 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp654,2 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp11,6 M)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp345,0 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5	40	40	60	60	100	100
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15	50	50	75	75	100	100
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	100	100	100	100	100
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30	40	40	70	70	80	80
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



BATAM KOTA, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Kesatria Purba
19700725 199603 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro
19720417 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]



HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI
 PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
 BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
 PERIODE: TRIWULAN IV-AKHIR

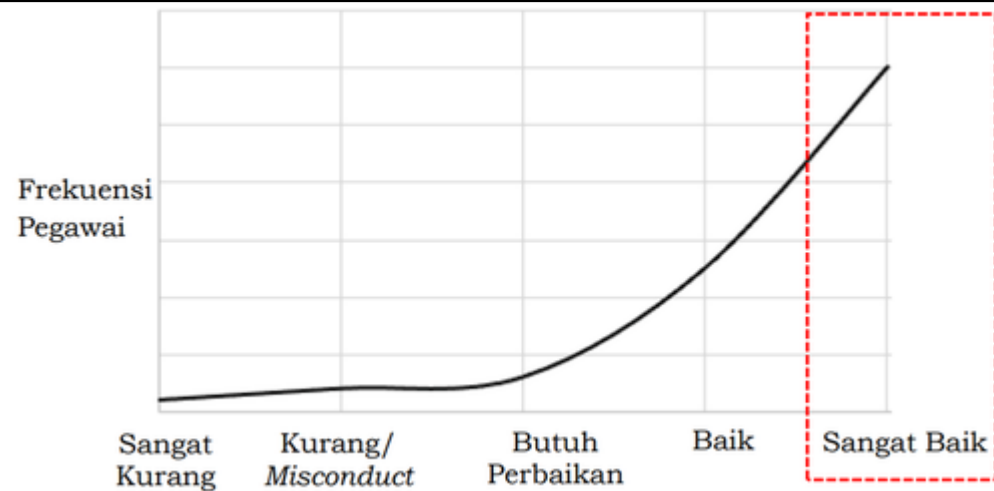
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2025

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Kesatria Purba	1	NAMA	Wahyu Prihantoro
2	NIP	19700725 199603 1 001	2	NIP	19720417 199703 1 001
3	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
5	UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 ISTIMEWA

POLA DISTRIBUSI



HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. UTAMA						
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan	105,29	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Penerima Layanan	128,21	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	Penerima Layanan	103,84	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
4	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100	Penerima Layanan	105,99	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
5	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	Penerima Layanan	136,36	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
6	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan	119,83	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.

7	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan	97,76	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
8	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis	101,52	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
9	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase evaluasi kinerja BMN	100	Proses Bisnis	120	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
10	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	Proses Bisnis	149,47	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
11	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	Proses Bisnis	104,42	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
12	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase produktivitas lelang	80	Proses Bisnis	115,87	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
13	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran	120	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
14	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran	120	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
15	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	Penguatan Internal atau Anggaran	97,31	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
16	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran	116,76	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.

17	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran	114,25	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
18	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran	98,74	Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.
B. TAMBAHAN						
19	Pengelolaan Pengaduan yang efektif	Persentase Pengelola Pengaduan di KPKNL Batam	100	-	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
20	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Persentase Penyelesaian Tugas sebagai Keanggotaan Panitia Urusan Piutang Negara	100	-	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
21	Pengelolaan penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kepulauan Riau	Persentase Penyelesaian Tugas Keanggotaan Tim Sekretariat Bersama Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	100	-	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
22	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif	Persentase Penyelesaian Tugas Tim Kerja Keberlanjutan ZI WBK	100	-	100	Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi kinerjamu, ya.
RATING HASIL KERJA DI ATAS EKSPEKTASI						
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi pelayanan					
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa		- Terima kasih untuk semangat Bapak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi dan telah menjadi

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
		membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	<p>role model bagi pegawai dalam hal bekerja dengan profesional dan berintegritas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih untuk semangat Anda dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi - Terima kasih untuk semangat Anda dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi - Terima kasih untuk semangat Anda dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi - Apresiasi tertinggi untuk pencapaian serta semangat yang Anda tunjukkan dalam melayani secara maksimal
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih untuk semangat Bapak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi dan telah menjadi role model bagi pegawai dalam hal bekerja dengan profesional dan berintegritas - Luar biasa, Saudara telah mampu menunjukkan semangat berintegritas dalam bekerja dan berkontribusi bagi

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
			<p>organisasi. Teruslah menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi tertinggi untuk Saudara, Integritas yang ditunjukkan dalam bekerja mampu menginspirasi sekaligus berkontribusi dengan luar biasa - Luar biasa, Saudara telah mampu menunjukkan semangat berintegritas dalam bekerja dan berkontribusi bagi organisasi. Teruslah menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas - Apresiasi tertinggi untuk Saudara, Integritas yang ditunjukkan dalam bekerja mampu menginspirasi sekaligus berkontribusi dengan luar biasa
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih untuk semangat Bapak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi dan telah menjadi role model bagi pegawai dalam hal bekerja dengan profesional dan berintegritas

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
			<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih telah menunjukkan komitmen terbaik dalam berkinerja pada periode ini - Terima kasih telah menunjukkan komitmen terbaik dalam berkinerja pada periode ini - Terima kasih telah menunjukkan komitmen terbaik dalam berkinerja pada periode ini - Apresiasi yang sangat tinggi untuk Saudara. Terima kasih atas komitmen terbaik yang berhasil ditunjukkan dalam tugas pekerjaan selama ini
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih untuk semangat Bapak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi dan telah menjadi role model bagi pegawai dalam hal bekerja dengan profesional dan berintegritas - Apresiasi tertinggi untuk Anda. Terima kasih untuk semangat yang ditunjukkan dalam mewujudkan semangat kolaborasi serta kerjasama yang luar biasa pada periode

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
			<p>ini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi tertinggi untuk Anda. Terima kasih untuk semangat yang ditunjukkan dalam mewujudkan semangat kolaborasi serta kerjasama yang luar biasa pada periode ini - Apresiasi tertinggi untuk Anda. Terima kasih untuk semangat yang ditunjukkan dalam mewujudkan semangat kolaborasi serta kerjasama yang luar biasa pada periode ini - Apresiasi luar biasa untuk Anda. Terima kasih untuk semangat kolaborasi dan kerjasama yang Anda tunjukan selama ini. Sebarkan semangat tersebut pada lingkungan kerja kita
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih untuk semangat Bapak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi dan telah menjadi role model bagi pegawai dalam hal bekerja dengan profesional dan berintegritas

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
			<ul style="list-style-type: none"> - Luar biasa, Saudara telah mampu menunjukkan semangat berintegritas dalam bekerja dan berkontribusi bagi organisasi. Teruslah menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas - Apresiasi tertinggi untuk Saudara, Integritas yang ditunjukkan dalam bekerja mampu menginspirasi sekaligus berkontribusi dengan luar biasa - Luar biasa, Saudara telah mampu menunjukkan semangat berintegritas dalam bekerja dan berkontribusi bagi organisasi. Teruslah menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas - Apresiasi tertinggi untuk Saudara, Integritas yang ditunjukkan dalam bekerja mampu menginspirasi sekaligus berkontribusi dengan luar biasa
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih untuk semangat Bapak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk organisasi dan telah menjadi

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
		serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.	<p>role model bagi pegawai dalam hal bekerja dengan profesional dan berintegritas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semangat Anda dalam mewujudkan inisiatif kerja harus diapresiasi setinggi-tingginya. Pertahankan dan sebarkan semangat itu pada lingkungan kerja kita bersama - Semangat Anda dalam mewujudkan inisiatif kerja harus diapresiasi setinggi-tingginya. Pertahankan dan sebarkan semangat itu pada lingkungan kerja kita bersama - Luar biasa, Anda mampu menunjukkan inisiatif kerja terbaik dalam kinerja di periode ini. Pertahankan dan sebarkan semangat itu pada skala yang lebih luas - Semangat Anda dalam mewujudkan inisiatif kerja harus diapresiasi setinggi-tingginya. Pertahankan dan sebarkan semangat itu pada lingkungan kerja kita bersama
7	Kolaboratif <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk	- Terima kasih untuk semangat Bapak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk

PERILAKU KERJA		UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
	mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.	<p>organisasi dan telah menjadi role model bagi pegawai dalam hal bekerja dengan profesional dan berintegritas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi tertinggi untuk Anda. Terima kasih untuk semangat yang ditunjukkan dalam mewujudkan semangat kolaborasi serta kerjasama yang luar biasa pada periode ini - Apresiasi tertinggi untuk Anda. Terima kasih untuk semangat yang ditunjukkan dalam mewujudkan semangat kolaborasi serta kerjasama yang luar biasa pada periode ini - Apresiasi tertinggi untuk Anda. Terima kasih untuk semangat yang ditunjukkan dalam mewujudkan semangat kolaborasi serta kerjasama yang luar biasa pada periode ini - Apresiasi luar biasa untuk Anda. Terima kasih untuk semangat kolaborasi dan kerjasama yang Anda tunjukan selama ini. Sebarkan semangat tersebut pada lingkungan kerja

PERILAKU KERJA	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
	kita
RATING PERILAKU KERJA DI ATAS EKSPEKTASI	
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI SANGAT BAIK	

31 Januari 2026
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro
19720417 199703 1 001





DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERIODE: TRIWULAN IV-AKHIR

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2025

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: Kesatria Purba
	NIP	: 19700725 199603 1 001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Tingkat I (IV/b)
	JABATAN	: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam
	UNIT KERJA	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Wahyu Prihantoro
	NIP	: 19720417 199703 1 001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Utama Muda (IV/c)
	JABATAN	: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
	UNIT KERJA	: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: Rionald Silaban
	NIP	: 19660423 199010 1 001
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Utama (IV/e)
	JABATAN	: Direktur Jenderal Kekayaan Negara
	UNIT KERJA	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: ISTIMEWA
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: SANGAT BAIK
5.	CATATAN/ REKOMENDASI	
	-	

Pegawai yang Dinilai

31 Januari 2026
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Kesatria Purba
19700725 199603 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Prihantoro
19720417 199703 1 001

